

BUMDES DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Editor:
Dr. Cucu Nurhayati, M.Si.

Judul:

BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xviii+196 hlm.; 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-60367-7-3

Cetakan Pertama, 2018

Penulis:

Rohani Budi Prihatin

Mohammad Mulyadi

Nur Sholikah Putri Suni

Editor:

Dr. Cucu Nurhayati, M.Si.

Desain Sampul:

Fajar Wahyudi

Tata Letak:

Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerjasama dengan:

Intelgensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341- 573650 Fax. 0341-588010

redaksi.intrans@gmail.com

www.intranspublishing.com

Kata Pengantar

Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya maka bunga rampai yang berjudul **“BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa”** dapat diterbitkan. Buku ini merupakan salah satu buku bunga rampai yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian pada tahun 2018 dan ditulis oleh para peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Buku ini juga merupakan hasil penelitian dan kajian dari para peneliti bidang Kesejahteraan Sosial atas fenomena Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan antara Maret-September 2018. Hasil penelitian dan tinjauan dari berbagai disiplin ilmu memberikan warna tersendiri terhadap buku bunga rampai ini sehingga memberikan manfaat banyak bagi para pembaca untuk memahami permasalahan BUMDes.

Terdapat tiga tulisan yang terdapat dalam buku ini. Bagian pertama ditulis oleh Rohani Budi Prihatin dan Nurhadi Wiyono yang membahas mengenai **“BUMDes Sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Desa.”** Bagian selanjutnya berjudul **“Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan BUMDes: Studi pada BUMDes Cahaya Makmur di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah dan BUMDes Tirta Mandiri di Kabupaten Klaten Jawa Tengah.”** Sementara itu, tulisan terakhir berjudul **“BUMDes dan Relevansinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Kesehatan”** yang ditulis oleh Nur Sholikhah Putri Suni.

Buku ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pengetahuan terhadap kebijakan dan manfaat BUMDes dalam menggerakkan perekonomian sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemikiran dan beberapa hasil temuan lapangan dalam buku ini secara khusus disumbangkan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang

dalam tugasnya membutuhkan data, fakta, serta analisis yang terkait dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Sebagai Kepala Pusat Penelitian (Kapuslit) Badan Keahlian DPR RI, saya menghargai segenap penulis dan mendorong agar pada masa mendatang dapat dihasilkan buku-buku lain yang bermanfaat bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta untuk masyarakat pada umumnya.

Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Cucu Nurhayati, M.Si. atas sumbangan pemikirannya dan upayanya dalam melakukan kegiatan editorial sehingga buku ini layak dibaca.

Kritik dan saran dari pembaca atas buku ini sangat saya harapkan demi penyempurnaan penerbitan buku selanjutnya di kemudian hari. Akhirnya, saya berharap semoga penerbitan buku ini dapat menambah manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, 17 Oktober 2018

Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, M.Si.

NIP. 19711117 199803 1 004

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xii
Daftar Gambar/Diagram	xviii
Prolog	1

BAGIAN 1

BUMDES SEBAGAI GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT DESA

Robani Budi Prihatin dan Nurbadi Wiyono

1. Pendahuluan	5
2. Landasan Hukum	7
3. BUMDes sebagai Gerakan Sosial	14
a. BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kabupaten Klaten	16
b. BUMDes “SEJAHTERA” di Desa Bleberan, Kabupaten Gunungkidul DI	17
c. BUMDes Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kab. Gunung Kidul	19
d. BUMDes Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor dan BUMDes Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro	22
e. BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam Kec. Siulak Kab. Kerinci	25

f. BUMDes Gerbang Nusantara, Desa Dataran Kempas Kab. Tanjung Jabung Barat	28
4. Permasalahan yang Dihadapi BUMDes	30
5. Kesimpulan	33
Daftar Pustaka	35

BAGIAN 2

ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUMDES (STUDI PADA BUMDES CAHAYA MAKMUR DI KAB. SIGI SULAWESI TENGAH DAN BUMDES TIRTA MANDIRI DI KAB. KLATEN JAWA TENGAH)

Mohammad Mulyadi

Pendahuluan	39
Partisipasi Masyarakat	42
Pengembangan BUMDes	52
Kesejahteraan Masyarakat	56
Variabel Kesejahteraan Masyarakat	83
Variabel Kesejahteraan Masyarakat	127
Pengujian Hipotesis Pengaruh Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Anggota BUMDes	156
Simpulan dan Saran	160
Daftar Pustaka	162

BAGIAN 3
BUMDES DAN RELEVANSINYA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI SEKTOR KESEHATAN

Nur Sholikah Putri Suni

A. Pendahuluan	165
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	168
C. Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Kesehatan	172
D. Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Kesehatan	174
E. Kontribusi BUMDes dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Kesehatan	177
F. Penutup	182
Daftar Pustaka	184
Epilog	187
Indeks	191
Indeks Pengarang	195

Daftar Tabel

Tabel 1	Hasil Validitas Variabel X	65
Tabel 2	Hasil Validitas Variabel Y	66
Tabel 3	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Implementation</i>	72
Tabel 4	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Implementation</i>	72
Tabel 5	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Benefit</i>	77
Tabel 6	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Benefit</i>	77
Tabel 7	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Evaluation</i>	81
Tabel 8	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan Perumahan Kesehatan dan Perlindungan	84
Tabel 9	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan, Perumahan, Kesehatan dan Perlindungan	84
Tabel 10	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar	85
Tabel 11	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar	86

Tabel 11	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	96
Tabel 12	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	96
Tabel 13	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	100
Tabel 14	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	100
Tabel 15	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Dimensi Skala Ekonomi, Ketersediaan, Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa	103
Tabel 16	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi Skala Ekonomi dan Ketersediaan dan Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa	103
Tabel 17	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat	107
Tabel 18	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat	108
Tabel 19	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Benefit</i>	121

Tabel 20	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Benefit</i>	121
Tabel 21	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Evaluation</i>	125
Tabel 22	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Evaluation</i>	125
Tabel 23	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan, Perumahan, Kesehatan dan Perlindungan	128
Tabel 24	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan, Perumahan, Kesehatan dan Perlindungan	128
Tabel 25	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar	129
Tabel 26	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar	130
Tabel 27	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar	136
Tabel 28	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar	136
Tabel 29	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	141

Tabel 30	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	141
Tabel 31	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	145
Tabel 32	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	146
Tabel 33	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi Skala Ekonomi dan Ketersediaan dan Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa	149
Tabel 34	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden Dimensi Skala Ekonomi, Ketersediaan dan Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa	149
Tabel 35	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat	153
Tabel 36	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat	154
Tabel 37	Hasil Uji Pengaruh Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Anggota BUMDes Cahaya Makmur Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah	157
Tabel 38	Hasil Uji Pengaruh Partisipasi terhadap Kesejahteraan Anggota BUMDes Tirta Mandiri Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah	159

Daftar Diagram

Diagram 1	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Decision Making</i>	68
Diagram 2	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Menghadiri Rapat	68
Diagram 3	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Memberikan Pendapat/Saran	69
Diagram 4	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Memberikan Data/Informasi dalam Setiap Pertemuan/Rapat Pengembangan BUMDes	70
Diagram 5	Kajian Terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses/Perumusan Pembuatan Keputusan	71
Diagram 6	Persentase Kontribusi Tenaga dalam Kegiatan BUMDes	73
Diagram 7	Persentase dalam Memberikan Kontribusi Ide/ Pemikiran dalam Kegiatan BUMDes	74
Diagram 8	Persentase dalam Kontribusi Uang dalam Kegiatan BUMDes	75
Diagram 9	Persentase dalam Kontribusi Bahan/Material dalam Kegiatan BUMDes	76
Diagram 10	Kajian terhadap Mengikuti Kegiatan Kelompok Usaha Ekonomi Desa yang akan Memberikan Tambahan Penghasilan Ekonomi Keluarga (n=79)	78
Diagram 11	Kajian terhadap Menggunakan Produk/Layanan yang Dihasilkan Kelompok Usaha Ekonomi Desa (n=79)	79

Diagram 12	Kajian Terhadap Memelihara/Merawat/Merasa Memiliki Fasilitas Kelompok Usaha Ekonomi Desa (n=79)	80
Diagram 13	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Evaluation</i>	81
Diagram 14	Kajian Terhadap Melakukan Kritik/Koreksi terhadap Jalannya Kegiatan Pengembangan BUMDes (n=79)	82
Diagram 15	Kajian Terhadap Memberikan Saran terhadap Jalannya Kegiatan Pengembangan BUMDes (n=79)	83
Diagram 16	Kajian terhadap Mampu Membeli Sembako (n=79)	87
Diagram 17	Mampu Membangun Rumah yang Layak Huni (n=79)	87
Diagram 18	Mampu Membiayai Biaya Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=79)	88
Diagram 19	Kajian Terhadap Mampu Membayar Iuran BPJS (n=79)	89
Diagram 20	Mampu Membayar Iuran Keamanan di Lingkungan Permukimannya (n=79)	90
Diagram 21	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar	91
Diagram 22	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar	91
Diagram 23	Kajian terhadap Mudah Mendapatkan Sembako (n=79)	92

Diagram 24	Kajian Terhadap Mudah Mendapatkan Bantuan untuk Membangun Rumah yang Layak Huni (n=79)	93
Diagram 25	Kajian Memiliki Akses Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=79)	94
Diagram 26	Kajian Merasa Aman di Lingkungan Peremukannya (n=79)	95
Diagram 27	Kajian terhadap Kualitas Hidup yang Lebih Baik (n=79)	97
Diagram 28	Kajian terhadap Tingkat Pendapatan Menjadi makin meningkat (n=79)	98
Diagram 29	Kajian terhadap Pendidikan Menjadi Lebih Baik (n=79)	99
Diagram 30	Kajian Terhadap Saling Menghargai/Menghormati antar-Warga Masyarakat (n=79)	101
Diagram 31	Kajian Terhadap Saling Bekerja Sama/Membantu Antarwarga Masyarakat (n=79)	102
Diagram 32	Kajian terhadap Munculnya Usaha Bangkitan/ Ikutan (n=79)	104
Diagram 33	Kajian terhadap Munculnya Usaha Rintisan (n=48)	105
Diagram 34	Kajian terhadap Menurunnya Tingkat Pengangguran (n=79)	106
Diagram 35	Kajian terhadap Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal (n=79)	107
Diagram 36	Kajian terhadap Menggunakan Komputer/ Laptop (n=79)	109
Diagram 37	Kajian terhadap Menggunakan <i>Handphone</i> (n=79)	110

Diagram 38	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation In Decision Making</i>	111
Diagram 39	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation In Decision Making</i>	111
Diagram 40	Kajian terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam Menghadiri Rapat Perencanaan Pengembangan BUMDes tersebut (n=95)	112
Diagram 41	Kajian Terhadap Mengemukakan Pendapat atau Saran dalam Setiap Pertemuan/Rapat BUMDes (n=95)	113
Diagram 42	Kajian Terhadap Memberikan Data/Informasi dalam Setiap Pertemuan/Rapat Pengembangan BUMDes (n=95)	114
Diagram 43	Kajian Terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses/Perumusan Pembuatan Keputusan (n=95)	115
Diagram 44	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Implementation</i>	116
Diagram 45	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Implementation</i>	116
Diagram 46	Kajian terhadap Kontribusi dengan Tenaga (n=95)	117
Diagram 47	Kajian terhadap Kontribusi Ide/Pemikiran (n=95)	118
Diagram 48	Kajian terhadap Kontribusi dengan Uang (n=95)	119
Diagram 49	Kajian terhadap Kontribusi dengan Bahan (Material)	120

Diagram 50	Kajian terhadap Mengikuti Kegiatan Kelompok Usaha Ekonomi Desa yang akan Memberikan Tambahan Penghasilan Ekonomi Keluarga (n=95)	122
Diagram 51	Kajian terhadap Menggunakan Produk/Layanan yang Dihasilkan Kelompok Usaha Ekonomi Desa (n=95)	123
Diagram 52	Kajian terhadap Memelihara/Merawat/Merasa Memiliki Fasilitas Kelompok Usaha Ekonomi Desa (n=95)	124
Diagram 53	Kajian terhadap Melakukan Kritik/Koreksi terhadap Jalannya Kegiatan Pengembangan BUMDes (n=95)	126
Diagram 54	Kajian terhadap Memberikan Saran terhadap Jalannya Kegiatan Pengembangan BUMDes (n=95)	127
Diagram 55	Kajian terhadap Mampu Membeli Sembako (n=95)	131
Diagram 56	Kajian terhadap Mampu Membangun Rumah yang Layak Huni (n=95)	132
Diagram 57	Kajian Mampu Membiayai Biaya Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=95)	133
Diagram 58	Kajian terhadap Mampu Membayar Iuran BPJS (n=95)	134
Diagram 59	Kajian terhadap Mampu Membayar Iuran Keamanan di Lingkungan Peremukimannya (n=95)	135
Diagram 60	Kajian terhadap Mudah Mendapatkan Sembako (n=95)	137

Diagram 61	Kajian terhadap Mudah Mendapatkan Bantuan untuk Membangun Rumah yang Layak Huni (n=95)	138
Diagram 62	Kajian terhadap Memiliki Akses Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=95)	139
Diagram 63	Kajian terhadap Merasa Aman di Lingkungan Permukimannya (n=95)	140
Diagram 64	Kajian terhadap Kualitas Hidup yang Lebih Baik (n=95)	143
Diagram 65	Kajian terhadap Tingkat Pendapatan Makin Meningkat (n=95)	144
Diagram 66	Kajian terhadap Pendidikan Menjadi Lebih Baik (n=95)	145
Diagram 67	Kajian terhadap Saling Menghargai Menghormati Antarwarga Masyarakat (n=95) ...	147
Diagram 68	Kajian terhadap Saling Membantu Antarwarga Masyarakat (n=95)	148
Diagram 69	Kajian terhadap Munculnya Usaha Bangkitan/ Ikutan (n=95)	150
Diagram 70	Kajian terhadap Munculnya Usaha Rintisan (n=95)	151
Diagram 71	Kajian terhadap Menurunnya Tingkat Pengangguran (n=95)	152
Diagram 72	Kajian terhadap Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal (n=95)	153
Diagram 73	Kajian terhadap Menggunakan Komputer/ Laptop (n=95)	155
Diagram 74	Kajian terhadap Menggunakan Handphone (n=95)	156

Daftar Gambar

Gambar 1	Kajian terhadap Memiliki Akses Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=79)	179
Gambar 2	Kajian terhadap Mampu Membiayai Biaya Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=95)	180
Gambar 3	Kajian terhadap Mampu Membayar Iuran BPJS (n=79)	181
Gambar 4	Kajian terhadap Mampu Membayar Iuran BPJS (n=95)	182

Prolog

Jalan tanah yang masih becek jika hujan, minim fasilitas dan penuh nestapa, mungkin itulah gambaran umum desa pada masa lalu. Barangkali, saat ini pun masih ada benarnya jika ditemukan kondisi mengenaskan tersebut. Namun, tidak sedikit pula gambaran masa lalu tersebut kini keliru karena kesadaran di desa untuk berubah dengan disokong ketersediaan dana negara, swasta, dan pendampingan para pihak yang pada akhirnya memunculkan geliat perubahan besar pedesaan di Indonesia.

Memang ada benarnya bahwa desa saat ini memiliki berbagai permasalahan ekonomi seperti rendahnya penguasaan lahan dan skala usaha yang relatif kecil bahkan cenderung subsisten; akses pendanaan yang terbatas dan cenderung berpola '*ijon*'; kurang memiliki akses pasar dan nilai tawar yang rendah; kurang memiliki pengetahuan mengenai cara produksi yang baik; sarana dan prasarana belum mendukung input produksi, proses produksi, dan pasca-produksi. Hadirnya BUMDes dalam hal ini menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut, yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Di Yogyakarta misalnya, tumbuh subur desa-desa wisata, seperti di Gunung Kidul dan Kulon Progo, serta desa wirausaha di Bantul yang kian dikenal publik. Begitu pula di Jawa Tengah, seperti di desa Ponggok, Klaten, yang beberapa tahun terakhir membentuk tren desa wisata yang viral di media sosial. Umumnya diawali dari pembangunan fisik infrastruktur sambil meletakkan dasar-dasar meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Banyak contoh pengelolaan desa sukses di tengah banyaknya laju desa yang jalan di tempat atau malah tertinggal. Kolaborasi para pihak menjadi kunci, selain keberadaan tokoh lokal sebagai eksekutor dan

pengarah. Desa Pujon Kidul salah satu contohnya. Desa di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, itu dulu tidak dikenal. Kini ia tenar sebagai tujuan wisata kuliner, agrowisata, dan swafoto yang unik. Setiap akhir pekan ada 3.000an pengunjung dan sekitar 500 pengunjung di hari kerja. BUMDes Pujon Kidul ini memiliki enam unit usaha. Sejak 2017, warga mendirikan Kafe Sawah di atas tanah kas desa seluas 8.500-meter persegi, plus lahan parkir. Usaha kafe ini mampu menampung 80 karyawan lokal. Dalam satu tahun, kafe tersebut memberi pemasukan Rp. 75 juta. Itu belum warung di sekitarnya yang diatur peraturan desa.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbang pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya

itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu BUMDes sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Ke depan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Keterlibatan banyak pihak ke desa selama mengikuti gerak kemajuan masyarakat. Misalnya, ada perusahaan yang ingin

membantu sebuah desa, maka tidak seenaknya membuat program sendiri. Harus melihat dokumen perencanaan yang dimiliki desa tersebut. Pada kasus ini, Undang-Undang tentang Desa telah menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Sebagai subyek, masyarakat desa berwenang memetakan persoalan mereka, merencanakan program pembangunan mengatasi persoalan, serta mengontrol pelaksanaan program.

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa.

BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Salah satu indikator dari suksesnya program BUMDes adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh BUMDes dalam menggerakkan sektor ekonomi masyarakat desa ke depannya harus menjadi prioritas pemerintah untuk mengukur sejauhmana keberhasilan program BUMDes.

Epilog

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di pedesaan adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola secara mandiri lingkup desa mereka melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang digunakan untuk mengatur dan menggerakkan perekonomian sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Pada dasarnya pendirian dan pengelolaan BUMDes sebagai wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan secara kooperatif, untuk itu membutuhkan pengelolaan BUMDes yang serius agar dapat memaksimalkan potensi desa.

Fakta membuktikan bahwa setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, jumlah BUMDes mengalami peningkatan yang sangat banyak. Hal ini setidaknya dipicu dari aturan pada Pasal 9 Peraturan Menteri tersebut yang menyatakan bahwa salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa adalah pendirian dan pengembangan BUMDes. Hal ini memicu pembentukan BUMDes di seluruh Indonesia kurang lebih 21,5 kali pada tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah BUMDes pada tahun 2014.

Jumlah ini pun diyakini akan terus meningkat karena salah satu amanah dalam penggunaan dana desa, selain untuk pembangunan infrastruktur, juga untuk peningkatan perekonomian masyarakat, salah satunya melalui wadah bernama BUMDes. Di bawah pengelolaan BUMDes, sejumlah desa wisata bahkan telah membuat sebuah desa menjadi sangat mandiri. Di samping itu, desa tampak mulai bergeliat dengan berbagai potensi yang dimilikinya.

Masih besarnya dominasi pemerintah dalam proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dan aset daerah. Dalam banyak kasus, proses-proses penyelenggaraan pemerintah juga ditandai oleh adanya 'patron-klien' antara pemerintah, pejabat, dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keputusan dan sumber daya lokal untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal sebagai bentuk pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau status aspirasi mereka di tingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi dokumen peraturan daerah, perencanaan dan anggaran untuk diimplementasikan. Di sini terbentang hambatan struktural bagi partisipasi masyarakat yang murni (*genuine*) dan substantif sebagai salah satu tujuan desentralisasi dengan pelaksanaannya. Partisipasi yang dikembangkan baru sebatas partisipasi simbolik (*degree of tokenism*), bahkan masih ditemukan partisipasi yang bersifat manipulatif sehingga tidak layak disebut sebagai partisipasi.

Hal ini disebabkan karena pemerintah masih memandang bahwa masyarakat bukan elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan dan penganggaran karena sudah terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat. Klaim ini menyebabkan tidak ada kewajiban dan keinginan yang kuat (terutama dalam level institusional dan operasional) untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan secara sungguh-sungguh keinginan dan harapan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Atas dasar temuan tersebut, sangat dibutuhkan instrumen

kebijakan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kebutuhan, aspirasi dan harapan masyarakat.

Dalam pelembagaan partisipasi, pemerintah seringkali hanya mengakui dan melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil yang berbadan hukum formal (NGO/LSM). Hal ini menyebabkan organisasi masyarakat di tingkat lokal dan atau organisasi yang tidak berbadan hukum misalnya asosiasi petani, kelompok nelayan, kelompok kesenian lokal, kelompok pendidikan, kelompok agama dan asosiasi masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya alam dan aset negara/daerah. Padahal peran mereka sebagai organisasi sosial, ekonomi dan budaya sangat kongkrit dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial maupun budaya.

Apabila menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan di desa adalah untuk masyarakat itu sendiri, maka cara yang terbaik adalah mengingatkan masyarakat bahwa pembangunan itu adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Pemberitahuan ini tidak selalu dapat berjalan dengan baik, dan hal ini sangat tergantung pada cara-cara pendekatan yang dilakukan. Satu hal yang menjadi catatan bahwa masyarakat tidak merasa memiliki apabila pembangunan tersebut tidak mengikutsertakan mereka.

Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan. Dengan demikian, dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan, terutama masyarakat pedesaan yang merupakan bagian penduduk terbesar dari masyarakat Indonesia. Lebih ditegaskan lagi

bahwa kegiatan partisipasi masyarakat adalah mutlak diperlukan adanya dalam pembangunan. Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif masyarakat yang dilaksanakan dengan menumbuhkan adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan adanya perubahan sikap mental, pandangan hidup, cara berpikir, dan cara bekerja. Pada kenyataannya, tidak semua anggota masyarakat mau berpartisipasi, dengan alasan yang bermacam-macam pula. Hal ini dapat disadari karena adanya beberapa faktor yang mungkin membuat mereka terdorong untuk berpartisipasi. Dorongan yang boleh dikatakan sangat bersifat umum adalah apabila hasil partisipasi tersebut dapat dinikmati langsung oleh mereka sendiri dan memberi keuntungan kepada mereka.

Harus diakui bahwa upaya pengelolaan BUMDes yang dapat semakin memperkuat peran partisipasi masyarakat bukanlah hal yang mudah dicapai. Sejumlah faktor turut berperan, di antaranya, *pertama*, faktor sosial ekonomi. Hal ini mencakup beberapa aspek penting seperti tingkat pemahaman dan sikap masyarakat terhadap keberadaan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan, konteks tingkat pendidikan, sosial budaya dan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. *Kedua*, faktor peran kepemimpinan daerah untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam struktur kelembagaan baik dari tingkat perencanaan sampai tingkat evaluasi. *Ketiga*, faktor sumber daya ekonomis/sosial lokal yang dijadikan sebagai landasan pembentukan sebuah BUMDes. Data menunjukkan bahwa sejumlah BUMDes yang dinilai berhasil lebih didominasi oleh 'nilai jual' sumber daya ekonomis/sosial lokal yang telah dikembangkan sebelumnya.

Indeks

A

akses 166, 175, 176, 178, 180, 181, 183, 186

aksi 168, 170, 174, 187, 191

anggaran 188, 189

APBD 191

APBN 191

B

barang 170

basis 168, 172, 177

bisnis 191

budaya 174, 189, 190

BUMDes 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191

bumdes 178, 186

C

capaian 176

cara 165, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 183, 187, 188, 189, 190

D

daerah 166, 176, 179, 180, 181, 182, 189, 190

dana 169, 170, 171, 174, 176, 177, 178, 185, 187, 188, 191

Data 190

desa 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 183, 186, 187, 188, 189, 191

Desa Ponggok 191

dominasi 175, 188, 190

E

ekonomi 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 187, 188, 189, 190

Eksistensi 168, 171

Eksternal 179, 186

evaluasi 190

F

Fakta 187

fasilitas 166, 176, 177, 178, 179, 180, 181

formal 171, 175, 177, 189

- G**
gerakan 167, 168, 171, 173, 187, 191
- H**
hambatan 188
hasil 168, 170, 172, 178, 179, 190, 191
hukum 166, 189
- I**
Indonesia 165, 167, 172, 174, 175, 176, 183, 184, 187, 189, 191
infrastruktur 188, 191
Inisiasi 166
IPM 167
iuran 166, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 183
- J**
Jaminan 175, 176, 184, 185
Jaminan Sosial 175, 184, 185
jaringan 170
- K**
keberhasilan 191
kebijakan 165, 188, 189, 191
kesejahteraan 165, 166, 167, 168, 171, 172, 174, 175, 177, 183, 184, 187, 189, 190
komersial 170
kontribusi 166, 170, 171, 173, 183, 184
kooperatif 187
- L**
laba 178
landasan 166, 190
layanan 166, 167, 168, 170, 175, 176, 178, 183, 184, 188, 189
lembaga 169, 170, 172, 184, 187, 189, 190
- M**
mandiri 167, 172, 174, 187, 188
masalah 168, 176, 183
masyarakat 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190
mekanisme 166, 172
modal 168, 170, 171
- N**
Nasional 170, 173, 175, 176, 177, 184, 185, 186
negara 168, 172, 174, 175, 176, 177, 183, 189
nelayan 189
- O**
operasional 188
optimal 167, 171, 176, 183

P

partisipasi 173, 188, 189, 190

pejabat 188

pengembangan 167, 168, 169,
172, 187

Permendesa 166, 186

potensi 166, 167, 169, 171, 172,
173, 174, 187, 188

produktivitas 167

R

regional 165

RELEVANSI 165

responden 180, 181, 182

S

sejahtera 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 174,
175, 177, 183, 184, 185,
186, 187, 189, 190

sektor 168, 170, 171, 173, 174,
175, 177, 179, 183, 184

skema 177

sosial 166, 167, 170, 173, 174,
175, 189, 190

T

tingkat 167, 174, 175, 176, 187,
188, 189, 190

U

UHC 168, 175, 176, 177, 179, 183

Unit 166

upaya 165, 167, 169, 172, 174,
175, 176, 183, 187, 190

W

warga 166, 174, 175, 177, 178,
180, 181, 182

wisata 188

Indeks Pengarang

C

Cohen 42, 162

M

Maulani 41

O

Oakley 42, 162

P

Pearse 42

U

Uphoff 42, 162

W

Wirutomo 41

